

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, N. (2018). Strategi Percepatan Pengembangan UPTD KPHP Model Meratus Di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma*. 7 (3):131-141.
- Afronyati, L. (2014). Analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), 37-52.
- Ashari, E. T. (2010). Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik. *Jurnal Borneo Administrator*, 6(2).
- Azansyah, A. (2013). Peran Kelembagaan Dalam Perekonomian, Kondisi Pembangunan Kelembagaan Di Indonesia, Dan Membangun Lembaga Yang Efektif. *Ekbisi*, 7(2)
- Bowornwathana, B., & Poocharoen, O. O. (2010). Bureaucratic politics and administrative reform: Why politics matters. *Public Organization Review*, 10(4), 303-321
- Budiningsih, K., Ekawati, S., Gamin, G., Sylviani, S., Suryandari, E. Y., & Salaka, F. (2015). Tipologi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(3).
- Djogo, T., & Syaf, R. (2003, June). Decentralization without accountability: power and authority over local forest governance in Indonesia. In *Issues of decentralization and federation in forest governance: proceedings from the Tenth Workshop on Community-based Management of Forestlands* (pp. 9-25)
- Dwidjowijoto, R.N. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 197 halaman
- Giessen, L., Krott, M., & Möllmann, T. (2014). Increasing representation of states by utilitarian as compared to environmental bureaucracies in international forest and forest-environmental policy negotiations. *Forest Policy and Economics*, 38, 97-104.
- Giessen, L., & Sahide, M. A. K. (2017). Blocking, attracting, imposing, and aligning: The utility of ASEAN forest and environmental regime policies for strong member states. *Land Use Policy*, 67, 13-26.

- Fatem, S. M., Awang, S. A., Pudyatmoko, S., Sahide, M. A., Pratama, A. A., & Maryudi, A. (2018). Camouflaging economic development agendas with forest conservation narratives: A strategy of lower governments for gaining authority in the re-centralising Indonesia. *Land use policy*, 78, 699-710
- Hanida, R. P. (2016). Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 15.
- Haryanto, Joko Tri (2015) "Ecological Fiscal Transfer Study as Potential Environmental Funding in The Region." *Journal of Social and Political Sciences* 18, no. 3: 252-266.
- HB, A. R., Dewi, I. N., & Kusumedi, P. (2011). Kajian Strategi Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 29186.
- Hubo, C., & Krott, M. (2013). Conflict camouflaging in public administration—a case study in nature conservation policy in Lower Saxony. *Forest Policy and Economics*, 33, 63-70
- Ilham, Q. P., Purnomo, H., & Nugroho, T. (2016). Analisis pemangku kepentingan dan jaringan sosial menuju pengelolaan multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 21(2), 114-119
- Kartodihardjo, H. (2008). Management of natural resources and environment. In *Seminar on Environment and Natural Resources*, University of Bengkulu, Bengkulu, Indonesia.
- Kartodihardjo H, Nugroho B, & Putro HR. 2011. *Forest Management Unit Development –Concept, Legislation and Implementation*. Directorate of Area Management and Preparation of Forest Area Utilisation, Directorate General of Forestry Planning, Ministry of Forestry
- Nuddin, A., Sinukaban, N., Murtalaksono, K., & Alikodra, H. S. (2007). Analisis sistem kelembagaan dalam perencanaan dan strategi pengelolaan lahan kritis DAS Bila. *Jurnal Penyuluhan*, 3(2)
- Nurprojo, I. S. (2014). Merit System dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah. *Civil Service Journal*, 8(1 Juni).
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.6/MENHUT-II/2009 tentang
Pembentukan Wilayah Kesatuan Hutan

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada
Dinas Kehutanan Provinsi Selatan

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada
Dinas Kehutanan Provinsi Selatan

Puspitojati, T., Darusman, D., Tarumingkeng, R. C., & Purnama, B.
(2012). Preferensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan
produksi: Studi kasus di kesatuan pemangkuan hutan Bogor. *Jurnal
Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(2), 96-113.

R. Alam Surya Putra, Saeful Muluk, Roy Salam, Bejo Untung dan Erman
Rahman (2019). Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis
Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE DAN TANE

Rachbini, D. J., dan Adi, R. (2004). *Ekonomi politik: kebijakan dan strategi
pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia.

Ruhimat, I. S. (2010). Implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan
Kehutanan*, 7(3), 169-178.

Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Maryudi, A., Dhiaulhaq, A., Wulandari, C.,
Kim, Y. S., & Giessen, L. (2018). Deadlock opportunism in
contesting conservation areas in Indonesia. *Land use policy*, 77,
412-424

Samin, R. (2011). Reformasi Birokrasi. *Jurnal Fisip Umrah*, 2(2), 172-182.

Setiyono, B. (2012). *Birokrasi Dalam Perspektif "Politik &
Administrasi"* (Vol. 1). NUANSA.

Staniland, Martin. 2003. Apakah Ekonomi Politik itu? Sebuah Studi Sosial
dan Keterbelakangan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sudiby, A. (2004). *Ekonomi politik media penyiaran*. LKIS PELANGI
AKSARA.

- Suryandari, E. Y., & Sylviani, S. (2010). Peran dan Koordinasi para Pihak dalam Pengelolaan KPH. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 227-246.
- Suwarno, S. (2008). Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik. *UNISIA*, 31(69).
- Sylviani, S., & Hakim, I. (2014). Analisis Tenurial dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 29125
- Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal riset bisnis dan manajemen*, 3(1).
- Thoha, M. (2008). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*.
- Usman, J. (2011). Manajemen Birokrasi Profesional dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Wance, M. (2017). Politik anggaran eksekutif dan legislatif pada pembahasan apbd kabupaten buru selatan 2015. *Journal of government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2(2), 178-204.
- Wardhono, A. (2009). Transformasi Kelembagaan Kepemilikan Tanah Desa Klompangan Kabupaten Jember. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 3(2), 1-10.
- Winarso, W. (2014). Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas (ROA) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(2), 258-271.

Lampiran 1. Biaya yang telah diinvestasikan untuk penyusunan kelembagaan KPH

Tabel 11. Biaya dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)	Biaya Per KPH (Rp)	Ket
1	2017	Penyusunan kajian Pembentukan KPH	100.000.000	6,250.000	16 KPH
2	2017	Perjalanan Dinas Koordinasi ke Kemen LHK dan Kemendagri	248.885.000	15.555.325	16 KPH
3	2018	Koordinasi dan Konsultasi kegiatan KPH	764.556.260	47.784.766	16 KPH
4	2018	Penyusunan Perencanaan Kebijakan teknis RPHJP	1.254.143.258	104.511.938	12 KPH
Total			2.367.584.518	174.102.029	

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi selatan

Tabel 12. Biaya dari BPKH VII Makassar

No	Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)	Biaya Per KPH (Rp)	Ket
1	2018	Inventarisasi Hutan pada Wilayah KPHL/KPHP pada Hutan Lahan Kering	851.206.000	212.801.500	4 KPH
2	2018	Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di sekitar KPH	166.474.000	41.618.500	4 KPH
3	2018	Rancangan Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan	462.496.992	115.624.248	4 KPH
Total			1.480.176.992	370.044.248	4 KPH

Sumber: BPKH Wilayah VII Makassar

Lampiran 2. Biaya yang dibutuhkan untuk penambahan jumlah KPH

Tabel 13. Prediksi Biaya Perencanaan

No	Jenis Sarpras	Volume	Satuan	Prediksi Anggaran (RP)
1	Biaya penyusunan kajian	1	Buku	75.000.000
2	Biaya Penyusunan RPHJP	15	Unit	3.750.000.000
TOTAL				3.825.000.000

Tabel 14. Prediksi Biaya sarana dan prasarana untuk 1 (satu) KPH

No	Jenis Sarpras	Volume	Satuan	Prediksi Anggaran (RP)
1	Tanah untuk Kantor	1	Paket	1.000.000.000
2	Bangunan Kantor	1	Unit	1.204.296.000
3	Kendaraan operasional			
	- Kendaraan Roda Empat	1	Unit	510.180.000
	- Kendaraan roda dua	5	Unit	193.050.000
4	Peralatan Kantor			
	- Meja kerja	24	Unit	26.400.000
	- Kursi Kerja	24	Unit	48.000.000
	- Lemari Kantor	5	Unit	
	- Peralatan elektronik kantor	1	Unit	
5	Peralatan Operasional			
	- Alat komunikasi	8	Unit	32.000.000
	- Perangkat keras computer	4	Unit	48.400.000
TOTAL				3.062.326.000

Tabel 15. Prediksi biaya operasional kantor 1 (satu) KPH setiap tahun

No	Biaya Operasional	Volume	Satuan	Prediksi Anggaran
1	Belanja telepon	1	Tahun	3.600.000
2	Belanja Air	1	Tahun	2.400.000
3	Belanja Listrik	1	Tahun	12.000.000
4	Belanja Internet	1	Tahun	4.200.000
5	Belanja Bahan Pembersih	1	Tahun	1.200.000
6	Alat tulis kantor	1	Tahun	6.000.000
Total				29.400.000

Tabel 16. Prediksi Pertambahan Anggaran Tunjangan Jabatan/Bulan

No	Jabatan	Jumlah Orang	Tunjangan (Rp)/Bulan	Total (Rp)/tahun
1	Kepala KPH	8	980.000	94.080.000
2	Kepala Seksi	24	540.000	155.520.000
Total				249.600.000

RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

1. Nama : Hermin Seleng Lisulembang
2. Tempat, tgl. Lahir : Nanggala / 13 Maret 1986
3. Alamat : Jl. Manuruki BTN Tabaria Blok E2 No 8
4. Status Sipil :
 - a. Nama suami : Yusuf Mangalik
 - b. Nama anak : Gaven Angelo Mangalik
Jessiah Eugenie Mangalik

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tamat SD tahun 1998 di SD Negeri 74 Rangri
 - b. Tamat SLTP tahun 2001 di SLTP Negeri 3 Sanggalangi
 - c. Tamat SLTA tahun 2004 di SMU Negeri 1 Rantepao
 - d. Sarjana (S1) tahun 2008 di Universitas Hasanuddin
2. Pendidikan Non formal
 - a. -

C. Pekerjaan

1. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
2. NIP : 19860313 201001 2 020
3. Jabatan : Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Unit Kerja : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

D. Karya ilmiah/artikel jurnal yang telah di publikasikan:

"The Bureaucratic Politics in Developing FMU after the Forestry Decentralization in South Sulawesi Province"

E. Makalah pada Seminar/konferensi Ilmiah Nasional dan Internasional: